

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hubungan Internasional interaksi antar aktor negara maupun non negara sudah merupakan suatu kelumrahan, hal ini terjadi karena adanya ketergantungan antar negara satu dengan yang lainnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun berbagai bidang lainnya. Ketergantungan ini menyebabkan adanya kompleksitas, dalam hubungan internasional yang terdiri dari berbagai aktor yang saling berinteraksi. Hubungan kerjasama antar negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk mulai dari kerjasama bilateral, kerjasama regional maupun kerjasama multilateral. Meskipun sudah merupakan kelumrahan, banyak faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya dinamika hubungan antar negara baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di dalam penelitian ini penulis akan menekankan pada bagaimana suatu isu dapat mempengaruhi hubungan bilateral antar negara, dalam hal ini bagaimana isu “*comfort women*” dapat mempengaruhi kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan.

Jepang merupakan negara yang memiliki pengaruh yang sangat besar di kawasan Asia Timur. Hal ini terutama dikarenakan oleh posisi Jepang sebagai negara penyedia *Official Development Assistance* (ODA) terbesar di kawasan, serta investasi dan kegiatan ekonomi Jepang lainnya yang banyak difokuskan di Asia timur dan sekitarnya. Contohnya pada tahun 1997, 29,4 % jumlah keseluruhan ODA Jepang difokuskan di wilayah Asia timur dan Asia, 20,6%

Foreign Direct Investment (FDI) Jepang berada di Asia Timur, begitu pula dari total keseluruhan perdagangan internasional Jepang, 38% nya dilakukan di wilayah Asia Timur (Hook, Gilson, Hughes, & Dobson, 2001). Akan tetapi usaha Jepang dalam membangun hubungan ekonominya dengan negara di kawasan tidak dapat menghapuskan sentimen anti Jepang atau *anti-Japanese feeling* akibat memori imperialisme Jepang di masa lalu, yang masih tumbuh di sebagian negara di Asia Timur seperti Cina dan Korea Selatan (www.japandailynews.com, 19/09/2016).

Meskipun Jepang dan Korea Selatan memiliki kedekatan geografis, dan berbagai persamaan nilai dan budaya, adanya sentimen anti Jepang di Korea Selatan dapat mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara. Sebagai negara yang memiliki pengaruh cukup besar di kawasan Asia Pasifik, hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan sangat penting terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan, akan tetapi kedekatan geografis serta persamaan nilai dan budaya yang dimiliki kedua negara tidak serta-merta menjamin kelancaran hubungan bilateral antar keduanya. Sebaliknya, hubungan antara Jepang dan Korea Selatan sering kali mengalami ketegangan, dan salah satu faktor utama pemicu ketegangan tersebut adalah isu sejarah (www.scmp.com, 19/09/2016). Terdapat beberapa isu sejarah yang sensitif dan mewarnai dinamika hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan. Diantaranya adalah, okupasi Jepang terhadap Korea, isu mengenai *Japanese textbook* yang menimbulkan anggapan pada masyarakat Korea bahwa Jepang telah mendistorsi fakta-fakta sejarah, konflik

sengketa Pulau Takeshima, serta isu “*comfort women*” (Glosserman & Synder, 2015, hal. 4).

Okupasi Jepang di Korea berawal sejak tahun 1910 dan berlangsung selama kurang lebih 3 dekade. Dalam masa pendudukannya tersebut, selain berusaha untuk merebut Korea, Jepang juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang kejam, seperti melarang penggunaan bahasa Korea, memaksa warga Korea untuk menerima sistem penamaan Jepang, serta salah satu yang paling kontroversial adalah melakukan rekrutmen secara paksa terhadap wanita-wanita Korea untuk dijadikan sebagai “*comfort women*”. (www.aljazeera.com, 15/09/16).

Kebijakan dan perlakuan-perlakuan Jepang di masa lalu tersebut ternyata meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Korea Selatan, dan pada akhirnya menimbulkan sentimen antar kedua negara. Bahkan, sentimen anti Jepang ini juga ditemukan di kalangan muda masyarakat Korea Selatan, yang *notabene* tidak terlibat dalam era penjajahan Jepang pada masa itu. Pada survey yang dilakukan oleh Koran *Donga* di Korea Selatan pada tahun 1990, 66% respondent menyatakan tidak menyukai Jepang (Gi-Wook & Sneider, 2007, hal. 24). Kemudian, pada beberapa survey serupa yang dilakukan hingga tahun 2005, persentase ketidaksukaan masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang ini konstan tinggi, dengan lebih dari 50% responden menyatakan tidak menyukai Jepang (Gi-Wook & Sneider, 2007, hal. 24).

Pada tahun 2013 ketika survey kembali diadakan oleh organisasi non-profit The Genron NPO dan *East Asia Institute* (EAI) dengan tujuan untuk kembali mengetahui pendapat warga Jepang dan Korea Selatan terkait hubungan antar kedua negara, hasil survey menyatakan 76.6% masyarakat Korea Selatan memiliki anggapan buruk terhadap Jepang, sedangkan di sisi lain 37.3% masyarakat Jepang memiliki anggapan yang buruk terhadap Korea Selatan (www.genron-npo.net, 15/09/16). Hal ini menunjukkan sentimen anti Jepang yang tumbuh pada masyarakat Korea Selatan masih tinggi, bahkan setelah delapan tahun survey yang serupa dilaksanakan, serta adanya *gap* persepsi antara Jepang dan Korea Selatan dalam memandang satu sama lain. Selain itu, survey tersebut juga menunjukkan bahwa salah satu alasan utama sentimen masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang berdasarkan perlakuan Jepang di masa lalu, sedangkan mayoritas masyarakat Jepang juga beranggapan bahwa sentimen mereka terhadap Korea Selatan dikarenakan kritik dan protes yang diajukan secara terus menerus oleh Korea Selatan terhadap Jepang terkait perbuatan Jepang di masa lalu. Sebagai negara yang demokratis, opini masyarakat tentunya sangat berpengaruh bagi kebijakan kedua negara. Dengan hasil opini masyarakat yang sedemikian rupa, tidak mengherankan jika hubungan kedua negara kerap kali memanas, meskipun juga terjalin kerjasama antar keduanya.

Salah satu isu yang cukup sering mencuat ke permukaan terkait memanasnya hubungan bilateral kedua negara adalah isu “*comfort women*”. “*Comfort women*” adalah wanita-wanita yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, sosial budaya, dan kewarganegaraan yang dipekerjakan secara paksa

sebagai budak seks oleh militer Jepang selama perang Asia-Pasifik (Kazue, 2016). Wanita-wanita ini berasal dari berbagai negara seperti Cina, Filipina, Indonesia dan Belanda (Kazue, 2016). Wanita-wanita tersebut kemudian dipaksa untuk tinggal dalam “*comfort station*” atau markas yang sengaja dibangun militer Jepang untuk wanita-wanita tersebut. Markas-markas tersebut tersebar di berbagai wilayah jajahan Jepang.

Tuntutan dari Korea Selatan terhadap Jepang untuk bertanggung jawab terhadap korban “*comfort women*” terus mengalir, salah satunya ditandai dengan *weekly protest* yang diajukan oleh masyarakat Korea Selatan, baik aktivitis maupun wanita-wanita yang merupakan korban “*comfort women*”, yang dilakukan di depan kedutaan besar Jepang di Korea Selatan sejak tahun 1992 (www.korea.stripes.com, 15/09/2016) . Protes ini dilakukan untuk menuntut permintaan maaf yang tulus dari pemerintah Jepang serta pertanggungjawaban bagi para korban “*comfort women*” di Korea Selatan. Bahkan, pada tahun 2011 untuk menandai 1000 kali protes yang mereka lakukan terhadap Jepang, para protester mendirikan monumen “*Pyeonghwa-bi*”, yaitu sebuah patung gadis remaja yang merupakan simbolis dari “*comfort women*” (www.korea.stripes.com, 15/09/2016).

Beberapa alasan mengapa isu “*comfort women*” menjadi isu yang berlarut-berlarut dan menyebabkan ketegangan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan, adalah persepsi yang berbeda antara kedua negara dalam memandang isu ini. Saat pertama kali isu ini diangkat ke publik pada tahun 1980, hingga tahun 1993 Jepang terus mengelak dan tidak pernah mengakui secara formal bahwa

militer dan pemerintah Jepang dengan sengaja melakukan penculikan, penyiksaan serta pemaksaan melakukan pelayanan seksual secara paksa terhadap wanita-wanita korban “*comfort women*” di Korea Selatan. Pengelakan ini terutama disampaikan oleh kelompok konservatif di Jepang.

Sebaliknya, Korea Selatan beranggapan bahwa “*comfort women*” merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Korea Selatan dan pemerintah Jepang turut andil dalam terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, Jepang bertanggung jawab untuk menyatakan permintaan maaf secara terbuka, serta memberikan tanggung jawab berupa kompensasi material secara resmi terhadap korban “*comfort women*” di Korea Selatan (www.asia.nikkei.com, 15/09/16).

Selain persepsi yang berbeda antar kedua negara, pergantian pemerintahan kedua negara juga memengaruhi pasang surutnya isu ini. Park Geun-hye, Presiden Korea Selatan yang mulai menjabat sejak tahun 2013 membenarkan bahwa adanya isu “*comfort women*” masih merupakan salah satu hambatan terbesar hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Ketika resmi terpilih sebagai Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye bahkan menyatakan bahwa ia menolak untuk mengadakan pertemuan formal dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, sebelum Jepang menyatakan permohonan maaf dan pertanggung jawabannya terhadap wanita korban “*comfort women*” di Korea Selatan (www.voanews.com, 15/09/16). Hal ini tentunya sedikit banyak dapat mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh isu “*comfort women*” terhadap kerjasama keamanan Jepang dan Korea Selatan pada periode 2011-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui, menganalisis, dan memahami bagaimana pengaruh isu “*comfort women*” sebagai isu sejarah terhadap persepsi masyarakat Jepang dan Korea Selatan dalam memandang satu sama lain
- b. Mengetahui, menganalisis, dan memahami bagaimana pengaruh isu “*comfort women*” terhadap proses kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Akademis
 - Memperkaya kajian Hubungan Internasional khususnya dalam terkait hubungan bilateral antar negara.
 - Memberikan pemahaman mengenai bagaimana melihat hubungan bilateral negara yang dipengaruhi isu sejarah.
2. Praktis
 - Sebagai bahan pembelajaran bagi pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan akademisi mengenai isu “*comfort women*” .

- Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam pentingnya memahami sejarah dalam membangun kerjasama dengan negara lain.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 *Memory, war, and world politics*

Untuk membantu peneliti menelaah hubungan antara Jepang dan Korea Selatan, serta menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan yang diambil Korea Selatan dalam membangun kerjasama keamanan bilateral dengan Jepang, maka peneliti akan menggunakan konsep *memory, war, and world politics* menurut pemikiran Duncan Bell. Konsep ini mengangkat pentingnya masa lalu atau sejarah dalam membentuk keadaan di masa sekarang. Secara khusus penulis akan menghubungkan dua aspek penting dalam konsep ini yaitu memori dan trauma yang kemudian mempengaruhi pandangan masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang.

Dalam *memory, war, and world politics* Bell menyatakan bahwa secara umum memori adalah proses dimana ingatan mengenai kejadian atau impresi yang berasal dari masa lalu dihimpun (Bell, 2006, hal. 2). Secara khusus Bell juga mendefinisikan memori kolektif atau *collective memory* sebagai persepsi bersama akan sejarah atau masa lalu (Bell, 2006, hal. 2). Korelasi akan pentingnya memori dan trauma dengan preferensi negara di masa sekarang, adalah memori akan trauma di masa lalu memainkan peran penting dalam membentuk persepsi politik, afiliasi, dan tindakan negara. Dalam praktiknya, kebijakan atau tindakan yang diambil negara dapat merupakan hasil atau bagian dari memori kolektif atau

kenangan akan masa lalu yang mendarah daging dalam negara tersebut, yang kemudian mendasari persepsi politik dan kebijakan yang diambil negara. Hal ini dikarenakan luka yang disebabkan oleh trauma biasanya tidak mudah untuk disembuhkan yang kemudian mendorong berbagai tindakan untuk menunjukkannya, sehingga memori akan trauma tersebut kemudian menyebar dari satu orang ke orang lainnya dalam masyarakat tersebut (Bell, 2006, hal. 7). Cathy Caruth menyatakan persebaran trauma ini selayaknya persebaran penyakit menular (Bell, 2006, hal. 7).

Untuk melangkah dari belenggu memori masa lalu dan trauma, Bell mengungkapkan mengenai *the ethics of memory* yaitu tanggung jawab bagi individual atau kelompok dalam mengingat ketidakadilan yang dilakukan masa lalu. Dalam menganalisa proses ini, Stephan Feuchtwang menyatakan aspek penting yang diperlukan untuk memperbaiki hubungan paska trauma, adalah melalui penghormatan dan permintaan maaf akan perilaku buruk yang dilakukan di masa lalu (Bell, 2006, hal. 21). Penghormatan dan permintaan maaf ini berperan penting dalam membentuk pemahaman yang sama akan sejarah bagi pihak pelaku dan korban.

Pandangan konsep ini sesuai dengan penelitian ini, karena penulis ingin menjelaskan bagaimana isu sejarah yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan kemudian mempengaruhi kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan di saat ini. Penelitian ini akan menjabarkan korelasi antara sejarah penjajahan Jepang di semenanjung Korea dan sistem "*comfort women*" dengan memori kolektif yang terbentuk pada masyarakat Korea Selatan dalam memandang

Jepang. Memori kolektif tersebut akan terlihat dalam persepsi negatif yang tercermin dalam opini publik Korea Selatan, yang kemudian mempengaruhi tindakan yang diambil pemerintah Korea Selatan dalam menyepakati kerjasama keamanan dengan Jepang.

1.5.2 Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies

Telah dikemukakan bagaimana sejarah dapat mempengaruhi pembentukan persepsi bersama atau memori kolektif pada masyarakat Korea Selatan yang tercermin dalam opini publik Korea Selatan dalam memandang Jepang. Dalam menjelaskan bagaimana opini publik kemudian mempengaruhi tindakan yang diambil pemerintah Korea Selatan terhadap kerjasama keamanan bilateral dengan Jepang, penulis akan menggunakan konsep *public opinion, domestic structure, and foreign policy in liberal democracies* menurut pemikiran Thomas Risse-Kappen.

Dalam konsep ini Thomas Risse menjelaskan bagaimana aspek domestik dalam hal ini opini publik mempengaruhi kebijakan luar negeri atau tindakan yang diambil oleh suatu negara. Konsep ini melengkapi literatur mainstream mengenai keterkaitan antara opini publik dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri pada negara liberal demokrasi, yaitu menggunakan pendekatan “*bottom-up*”, dimana pemimpin atau pemerintah mengikuti publik atau “*top-down*”, dimana asumsinya publik dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pemerintah dengan berbagai kondisi seperti, kebijakan luar negeri atau kebijakan keamanan

yang dinilai kurang memiliki signifikansi dibandingkan dengan kebijakan ekonomi, pengetahuan yang minim terkait isu yang diangkat, serta opini publik yang inkonsisten (Risse, 1991, hal. 481). Menurut Risse pendekatan ini terlalu sederhana karena pada realitanya opini publik dapat akan selalu berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara meskipun dengan berbagai cara atau derajat yang berbeda-beda.

Menurut Risse, interaksi antara elit politik dan publik dalam merumuskan kebijakan negara akan berbeda-beda, dipengaruhi oleh struktur domestik dan proses pembentukan koalisi politik dalam sebuah negara (Risse, 1991). Struktur domestik menentukan bagaimana sistem politik merespon keinginan masyarakat, sedangkan proses pembentukan koalisi adalah bagaimana jaringan kebijakan pada suatu negara terbentuk. Jaringan Kebijakan adalah berbagai kepentingan masyarakat yang diwakilkan oleh partai politik dan kelompok kepentingan yang menjadi penghubung antara masyarakat dan sistem politik (Risse, 1991, hal. 485).

Proses terbentuknya koalisi dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi *state-dominated*, *societal control*, dan *democratic corporatism* (Risse, 1991). *State-dominated*, yaitu pembentukan koalisi terkait kebijakan tertentu eksklusif bagi elit politik, dan tidak cenderung tidak mempertimbangkan opini publik. Bertolak belakang dengan *state-dominated* pada tipe *societal actor* pembentukan koalisi terkait kebijakan tertentu akan banyak dipengaruhi oleh opini publik. Tipe ini utamanya dapat ditemukan pada negara dengan masyarakat yang homogen, mobilitas sosial tinggi, tetapi struktur negara yang lemah. Sedangkan dalam *democratic corporatism* aktor politik dan sosial akan terlibat dalam proses tawar-

menawar yang kemudian membentuk konsensus antara kedua belah pihak dalam merumuskan kebijakan.

Kesimpulannya, opini publik dapat mempengaruhi kebijakan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Opini publik mempengaruhi kebijakan negara secara langsung apabila opini tersebut dapat merubah kebijakan atau tujuan kebijakan, ataupun bagaimana kebijakan tersebut diprioritaskan atau diimplementasikan. Akan tetapi, opini publik juga dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil negara secara tidak langsung dengan mempengaruhi proses pembentukan koalisi, yaitu dengan memperkuat atau melemahkan aktor politik atau sosial tertentu yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Besar atau tidaknya derajat pengaruh opini publik terhadap sebuah kebijakan sangat bergantung pada fragmentasi sosial dan struktur domestik negara. Semakin homogen masyarakat pada sebuah negara, maka semakin mudah opini publik dapat mempengaruhi kebijakan negara tersebut, selain itu pada struktur negara yang lemah atau *weak state*, maka pengaruh opini publik terhadap kebijakan luar negeri yang diambil negara akan lebih besar ketimbang terhadap struktur domestik negara yang kuat atau *strong state*.

Pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana opini publik korea selatan yang terbentuk melalui memori dan trauma terhadap Jepang terkait isu "*comfort women*" kemudian dapat mempengaruhi berlangsungnya proses kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan yang terhambat opini publik Korea Selatan hingga akhirnya berhasil disepakati setelah adanya penyelesaian konflik "*comfort women*" antara Jepang dan Korea Selatan.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa trauma akan sistem “*comfort women*” pada masa penjajahan Jepang di semenanjung Korea membentuk opini publik Korea Selatan berupa persepsi negatif terhadap Jepang, yang kemudian menghambat kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Kemudian, Jepang dan Korea Selatan berhasil membentuk kerjasama keamanan bilateral dikarenakan membaiknya hubungan bilateral kedua negara paska penyelesaian isu “*comfort women*”.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005, hal. 6). Penelitian kualitatif dapat dimanfaatkan untuk memahami isu-isu yang sensitif, menemukan perspektif baru, meneliti sesuatu secara mendalam, serta menelaah suatu latar belakang, seperti motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Oleh sebab itu peneliti mencoba untuk menganalisis hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan yang dipengaruhi oleh isu “*comfort women*” pada periode 2011-2016.

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Memori

Menurut Duncan Bell, memori adalah proses dimana ingatan mengenai kejadian atau impresi yang berasal dari masa lalu dihimpun (Bell, 2006, hal. 2). Kemudian, memori membentuk cerita sekelompok orang yang kemudian yang akan mereka ceritakan, dalam menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (Bell, 2006, hal. 2).

1.7.1.2 Trauma

Menurut For Caruth (dalam Resende & Budryte, 2014) trauma menggambarkan pengalaman yang luar biasa dari peristiwa spontan atau bencana, dimana respon terhadap peristiwa tersebut sering terjadi kelambatan, kemunculannya yang sering tidak terkendali, dan dapat terjadi berulang-ulang dari halusinasi dan fenomena mengganggu lainnya. Sedangkan menurut Stolorow, (dalam Resende & Budryte, 2014) esensi dari trauma terletak pada pengaruh pengalaman yang tak tertahankan, yang tidak dapat dijelaskan dalam hal intensitas rasa sakit yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa traumatis. Trauma pada pengalaman akan penghinaan, atau pengkhianatan akan membentuk pribadi yang mempunyai pemikiran waspada terhadap lingkungan sekitar guna untuk bertahan hidup dan tidakan yang idealisme untuk masa depan lebih baik (Bell, 2006, hal. 133)

1.7.1.3. Opini Publik

Dalam *Democracy – Reality and Responsibility* Janusz Ziolkowski mengemukakan dalam ilmu politik, opini adalah membenaran, pandangan, atau kepercayaan yang dimiliki seseorang terkait sebuah isu (Ziolkowski, 2001). Sedangkan sebagai kata sifat, publik berarti kepentingan atau tujuan bersama, atau setidaknya mayoritas orang yang berada di dalam sebuah unit politik (Ziolkowski, 2001). Dari pengertian berikut, dapat disimpulkan opini publik adalah pandangan atau kepercayaan bersama yang dimiliki seseorang terkait sebuah isu.

1.7.1.4 *Comfort Women*

“*Comfort women*” atau *Ianfu* adalah istilah yang digunakan pada masa penjajahan Jepang untuk menyebut wanita-wanita muda yang berasal dari berbagai bangsa dan latar belakang sosial, yang direkrut dan dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual terhadap tentara-tentara Jepang. Wanita-wanita ini di rekrut dan di tempatkan di berbagai “*comfort station*” yang tersebar di berbagai daerah jajahan Jepang.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1 Memori

Pengertian memori yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ingatan atau pengetahuan mengenai masa lalu. Kemudian, memori yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ingatan mengenai tindakan kejam yang dilakukan

militer Jepang terhadap korban “*comfort women*” pada masa penjajahan Jepang di semenanjung Korea.

1.7.2.2 Trauma

Pengertian trauma yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peristiwa menyakitkan di masa lalu yang kemudian mempengaruhi tindakan seseorang atau kelompok. Kemudian, trauma yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengalaman menyakitkan yang diterima korban “*comfort women*” dari militer Jepang yang bahkan dampaknya melampaui periode penjajahan Jepang di semenanjung Korea.

1.7.2.3 Opini Publik

Opini publik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah opini publik Jepang dan Korea Selatan dalam memandang satu sama lain dan isu “*comfort women*”, yang bersumber dari memori dan trauma akan penjajahan Jepang di semenanjung Korea.

1.7.2.4 *Comfort Women*

“*Comfort women*” yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah korban “*comfort women*” pada masa okupasi Jepang di semenanjung Korea, yang melibatkan Jepang sebagai pelaku dan Korea Selatan sebagai korban.

1.7.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu rangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan masalah yang menjadi fokus suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2010) . Penelitian ini melihat dan menggambarkan mengenai isu “*comfort women*” yang terjadi pada masa okupasi Jepang di semenanjung Korea yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan, kemudian pengaruhnya terhadap kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Pembahasan penelitian ini terbatas pada pengaruh isu “*comfort women*” terhadap hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang berlangsung pada tahun 2011-2016, yang kemudian penulis kerucutkan pada hubungan kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan dalam *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA).

Alasan penelitian ini dilakukan pada rentan tahun 2011 hingga tahun 2016, adalah karena di tahun di tahun 2011, hubungan Jepang dan Korea Selatan semakin memanas terkait isu “*comfort women*” hal ini salah satunya dapat dilihat dengan kemunculan patung sebagai simbolis “*comfort women*” di depan kedutaan Jepang di Korea Selatan yang didirikan para aktivis “*comfort women*” pada tahun

tersebut. Kemudian, penyelesaian final konflik “*comfort women*” antara Jepang dan Korea Selatan baru dibahas kembali pada tahun 2015, hingga akhirnya penyelesaian tersebut mempengaruhi kerjasama bilateral antar kedua negara dibidang keamanan yang diresmikan pada tahun 2016.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dalam usaha pengumpulan data yang valid, serta menghubungkan teori dengan data-data yang ada dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

1.1 Buku

Buku bacaan sangat berguna sebagai referensi terkumpulnya data yang kemudian penulis gunakan dalam pembuatan karya tulis ini, dari buku bacaan terdapat teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas pada karya tulis ini yang kemudian membantu penulis untuk menjelaskan permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ilmiah ini.

1.2 Jurnal Ilmiah

Penulis juga menggunakan jurnal ilmiah sebagai referensi dalam pengambilan data dan penggunaan teori-teori yang relevan dan berguna untuk menjelaskan mengenai isu *comfort women* dan hubungan Jepang dan Korea Selatan

1.3 E-Book

Penggunaan dari *e-book* sangat berguna bagi penulis sebagai salah satu sumber referensi dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengutamakan penggunaan literatur dari luar negeri yang kemudian penulis baca, ambil datanya, dan penulis kutip definisi yang terdapat didalamnya, melalui sarana *e-book*.

2. Studi Dokumentasi

Dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, penulis mengumpulkan dokumentasi data, fakta, dan berita terkait dengan isu yang penulis bahas dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu mengenai pengaruh isu “*comfort women*” terhadap kerjasama keamanan Jepang dan Korea Selatan.

2.1 Informasi Internet

Melalui internet penulis mencari data serta definisi dari teori-teori yang penulis gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, serta berbagai data penunjang penulisan karya tulis ilmiah ini.

2.2 Dokumentasi Media

Penulis menggunakan data dari dokumentasi media baik media lokal ataupun internasional yang didalamnya memuat pendapat mengenai hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 1982). Pendekatan kualitatif untuk menunjang fakta yang terjadi dan dengan teori dapat menganalisa fenomena tersebut. Dengan demikian, data dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif pula.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis pengaruh isu “*comfort women*” terhadap kerjasama keamanan Jepang dan Korea Selatan. Disamping itu analisis data dilakukan melalui proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan secara kualitatif yang bertujuan membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan fenomena yang diteliti melalui studi dokumentasi yang mendalam.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab I akan dibahas mengenai latar belakang dan urgensi dari masalah yang diangkat pada tulisan ilmiah ini. Pada Bab I juga terdapat rumusan masalah yang menjadi pertanyaan utama dari tulisan ilmiah ini yang harus dijawab melalui

penelitian yang kemudian akan dilakukan. Lalu pada Bab I juga terdapat tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian ilmiah ini. Selain itu, akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi teori-teori yang penulis gunakan sebagai acuan dan panduan dalam berpikir dan melihat permasalahan untuk membantu menjelaskan permasalahan yang penulis angkat. Bagian lain dari Bab I adalah, definisi konseptual, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Sejarah Sistem “*comfort women*” dan Pengaruhnya terhadap Opini Publik Jepang dan Korea Selatan

Pada bab II akan dijelaskan deskripsi mengenai isu *comfort women* yang meliputi sejarah, perkembangan, serta opini publik Jepang dan Korea Selatan dalam memandang satu sama lain dan isu sejarah antara keduanya.

Bab III: Pengaruh Isu “*Comfort Women*” terhadap Proses Kerjasama Keamanan antara Jepang dan Korea Selatan

Pada bab III akan diberikan analisis pengaruh isu “*comfort women*” terhadap proses kerjasama keamanan Jepang dan Korea Selatan, yang meliputi analisis pengaruh sejarah dan opini publik dalam menghambat kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan, serta pengaruh penyelesaian isu “*comfort women*” terhadap terbentuknya kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan.

Bab IV: Penutup

Pada bab IV akan berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai bagaimana pengaruh isu “*comfort women*” terhadap kerjasama keamanan Jepang dan Korea Selatan.